

**PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN OBAT-OBATAN
BERDASARKAN PSAP NO. 05 PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH MAJENE**

*Application Of Accounting For Medicines Inventory Based On
PSAP No. 05 At Majene Regional Public Hospital*

Dahlia

Email: dahlia@unsulbar.ac.id
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsulbar
Jl.Prof. Baharuddin Lopa, S Talumung Majene Sulawesi Barat

Musrifah Aliyah

Email: musrifahaliyah@gmail.com
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsulbar
Jl.Prof.Baharuddin Lopa,S Talummung Majene Sulawesi Barat

Nurfitri Ayu Mandasari

Email: ayumandasri@unsulbar.ac.id
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsulbar
Jl.Prof.Baharuddin Lopa,S Talummung Majene Sulawesi Barat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi persediaan dengan standar yang berlaku, yang diterapkan Rumah Sakit Umum Majene. Standar yang berlaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang akuntansi persediaan, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, seperti bukti transaksi, jurnal, hingga catatan atas laporan keuangan Rumah Sakit Umum Majene tahun anggaran 2017 dan 2018. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi persediaan Obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Majene telah diterapkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 05.

Kata Kunci: *Akuntansi Persediaan, PSAP No. 05*

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the application of inventory accounting to the applicable standards, which are applied by Majene General Hospital. The applicable standard referred to in this study is the Statement of Government Accounting Standards Number 05 concerning inventory accounting, which is contained in Government Regulation Number 71 of 2010. The data collection technique used is documentation, such as proof of transactions, journals, and notes to the financial statements of the Majene General Hospital for the 2017 and 2018 fiscal years. Data analysis was performed using qualitative data analysis

techniques. The results of this study indicate that the application of drug inventory accounting at Majene General Hospital has been applied in accordance with the Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 05.

Keywords : Inventory Accounting, PSAP No. 05

PENDAHULUAN

Sektor publik merupakan instansi yang dikelola dibawah pemerintah pusat maupun daerah. Tujuan dari didirikannya sektor publik adalah untuk memberikan fasilitas, pelayanan, dan kemudahan bagi semua masyarakat. Salah satu bentuk sektor publik yang diselenggarakan pemerintah adalah sektor kesehatan yaitu pendirian rumah sakit umum. Rumah sakit umum daerah merupakan salah satu instansi daerah atau sektor publik dimana mempunyai tugas memberikan pelayanan dalam hal kesehatan.

Rumah sakit merupakan kegiatan padat modal dan padat karya untuk operasional perusahaan, dan rumah sakit juga menekankan penerapan nilai-nilai sosial dan moral. Sebagai organisasi pelayanan kesehatan (medical safety organization), sebagian besar tindakan rehabilitasi atau rehabilitasi medik di suatu rumah sakit bergantung pada ketersediaan obat-obatan, bahkan dapat dikatakan bahwa obat merupakan jantung dari rumah sakit (Amanda, 2010).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05 No. 4 PP No. 71 tahun 2010 berdasarkan sistem akrual Persediaan adalah alat likuid berupa barang atau peralatan yang dirancang untuk mendukung operasional pemerintahan dan diperuntukkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai lembaga publik yang harus menyediakan barang dan jasa publik, maka instansi pemerintah seperti rumah sakit harus mengelola dan melakukan akuntansi persediaan dengan baik. Untuk pengolahan persediaan di instansi pemerintah harus memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, agar diperoleh informasi akuntansi yang relevan tentang persediaan. Penanganan persediaan dengan

mengacu pada standar tersebut secara jelas menggambarkan proses identifikasi, pengukuran dan penyajian persediaan yang ada (Erlina, 2015)

Dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No. 05 (PSAP 05) 2010, persediaan perlu dihitung dan direncanakan dengan cermat agar persediaan tetap terkendali. Artinya persediaan tidak boleh tidak mencukupi dan surplus, karena ini akan menyebabkan hal-hal yang tidak menguntungkan. Misalnya, kekurangan pasokan akan mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan, dan dengan demikian tidak dapat memenuhi permintaan. Suplai yang berlebihan juga merugikan organisasi, misalnya resiko ketidakpatuhan yang tinggi. Oleh karena itu, instansi tersebut harus mampu menangani perbekalannya sendiri semaksimal mungkin sesuai dengan kebijakan dan prosedur manajemen rumah sakit. Guna melakukan pekerjaan penghitungan persediaan secara rutin, dan beberapa personel bertanggung jawab pada setiap bagiannya sesuai dengan prosedur di sistem akuntansi rumah sakit.

Berdasarkan PSAP No. 05 Paragraf 13 PP No. 71 Tahun 2010, persediaan diakui:

- 1) Ketika pemerintah memperoleh potensi manfaat ekonomi masa depan dan nilai atau biayanya dapat diukur dengan andal; dan
- 2) Setelah menerima atau mengalihkan kepemilikan dan / atau kepemilikan.

Pada saat penyusunan laporan realisasi anggaran, pada saat pembelian hanya dicatat sebagai pengeluaran komoditas dan mempengaruhi estimasi perubahan SAL, sedangkan pada saat penyusunan laporan operasi, pembelian persediaan akan dicatat sebagai pengeluaran persediaan dan pengeluaran kas (Erlina, 2015). Nilai persediaan mencakup semua biaya yang harus dikeluarkan sebelum barang digunakan. Dalam PSAP No. 05 PP No. 71 Tahun 2010 ada tiga pilihan untuk mengukur serta menilai persediaan, yaitu Biaya perolehan berdasarkan pembelian. 2) Harga pokok produksi hasil produksi mandiri. 3) Harga atau nilai wajar, yang diperoleh dengan cara lainnya (Erlina, 2015).

PSAP No. 05 Paragraf 26 PP menyebutkan bahwa sesuatu perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan persediaan barang

ialah sistem Kebijakan akuntansi dalam penilaian angka persediaan, penjabaran lebih lanjut seperti barang atau perlengkapan yang diperuntukan untuk pelayanan kepada masyarakat, perlengkapan yang diperuntukan pada proses produksi, barang simpanan yang diperuntukan dalam proses penjualan atau hibah masyarakat, serta barang dalam proses produksi yang diperuntukan dalam proses penjualan.

Oleh karena, sistem akuntansi yang sesuai akan menghasilkan informasi akuntansi yang nantinya akan menjadi penentu dan kaidah dalam pengawasan intern organisasi. Pengawasan persediaan seharusnya dapat memberikan suatu fakta, bahwa data persediaan andal dari segi tampilan fisik, akumulasi nilai, kualitas, harga, maupun sistem pencatatannya. Persediaan memiliki hubungan signifikan pada laporan keuangan suatu OPD. Oleh karena itu rumah sakit umum daerah sebaiknya mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disertai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05 tentang Akuntansi Persediaan.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene merupakan satu satunya Rumah Sakit pemerintah yang menyelenggarakan akuntansi untuk persediaan spesifiknya pada barang persediaan obat-obatan yang nilainya signifikan dalam laporan keuangan setiap priode pelaporannya. Berdasarkan latar belakang diatas , peneliti akan melaksanakan penelitian tentang konsep penerapan akuntansi persediaan obat-obatan berdasarkan PSAP No. 05 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) sistem kualitatif merupakan penyajian hasil penelitian dalam bentuk kalimat, yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini akan menganalisis kesesuaian penerapan konsep pencatatan persediaan obat-obatan berdasarkan standar berlaku yakni Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 (PSAP 05) tentang akuntansi persediaan. Penelitian ini juga akan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 terkait persediaan. Penelitian berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Majene yang

berlokasi di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Di Jl. Poros Majene-Mamuju untuk tahun pelaporan 2019

Penelitian ini menggunakan *social situation* yang terdiri dari tiga objek yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2018). Penelitian ini melakukan observasi serta wawancara kepada subjek dari bagian akuntansi di gudang instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Majene dan bagian farmasi. Masing-masing 3 orang dari setiap bagiannya.

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Menurut Siyoto (2015) analisis data kualitatif adalah langkah untuk mengungkapkan makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data dan di analisis melalui beberapa tahapan diantaranya: reduksi atau penyederhanaan data, display data dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Adapun hasil dalam penelitian ini dikumpulkan dari beberapa dokumen yang berkaitan dengan persediaan obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene.

Prosedur pengadaan perbekalan farmasi

- 1) Instalasi farmasi membuat Laporan LPLPO dan BMHP tiap bulan dan menyerahkan ke Kepala Seksi
- 2) Kepala seksi menerima dan mendisposisikan dokumen ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat perencanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
- 4) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengusulkan perencanaan ke Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Direktur RSUD Majene
- 5) Setelah rencana usul pengadaan di setuju oleh PA, rencana pengadaan tersebut diserahkan kembali ke PPK.

- 6) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendisposisikan pengadaan obat dan perbekalan farmasi ke Pejabat Pengadaan (PP)
- 7) Pejabat Pengadaan (PP) melaksanakan persiapan dan melaksanakan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dibawah Rp 200.000.000,00 juta/paket
- 8) Pejabat Pengadaan (PP) melaksanakan E-Purchasing kepada masing-masing penyedia
- 9) Setelah mendapat konfirmasi dari penyedia, pejabat pengadaan meneruskan konfirmasi dari penyedia untuk menyetujui pembelian E-purchasing.

Proses pengadaan dalam bidang farmasi telah berjalan optimal sesuai dengan standar yang berlaku, dimana adanya pengawasan dari pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang disepakati oleh pejabat pembuat komitmen dan direktur rumah sakit.

Prosedur Penerimaan Perbekalan Farmasi

- 1) Panitia penerimaan barang farmasi, menelaah:
 - a) Faktur perbekalan farmasi (nama, satuan, jenis, dan bentuk sediaan)
 - b) Surat pesanan barang
 - c) Kondisi *packing*
 - d) Tanggal kadaluarsa
 - e) Bila memenuhi syarat, perbekalan farmasi di terima oleh panitia penerimaan barang setelah disetujui ketua penerimaan barang
 - f) Bila tidak sesuai dasar aturan, perbekalan farmasi tersebut dikembalikan ke *penyedia* untuk dilakukan proses penggantian
- 2) PPK membuat berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- 3) PPK membuat laporan realisasi obat dan perbekalan kesehatan kepada Pengguna Anggaran (PA)
- 4) Pengguna Anggaran menerima dan mendisposisikan laporan kepada kepala instalasi farmasi

- 5) Kepala instalasi farmasi menerima laporan dan mendisposisikan laporan ke seksi farmasi
- 6) Seksi farmasi merekapitulasi realisasi pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene

Sistematika penerimaan perbekalan farmasi telah selaras dengan sistem dan aturan yang ada, karena dalam penerimaan perbekalan farmasi tim penerima barang memeriksa apakah sesuai atau tidak dengan barang pesanan dan ataukah barang tidak ada yang cacat atau rusak. Bila sesuai maka dapat disetujui oleh ketua tim penerima barang rumah sakit.

Prosedur Pengadaan Obat Yang Tidak Tersedia

Yang dimaksud dengan pengadaan obat yang tidak tersedia adalah obat yang tidak tersedia atau obat baru yang tidak disediakan oleh instalasi farmasi Rumah Sakit yang bersifat CITO “segera”, ini menandakan bahwa obat ini harus segera disediakan karena sifatnya yang darurat. Keputusan Bupati Majene Nomor 1623/HK/KEP-BUP/V/2013, Tgl 15 Mei 2013, Tentang pembentukan Tim Penyusun SPO RSUD Kabupaten Majene, dan Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Majene No. 13/RSU-SK/VIII/2013, Tgl 1 Agustus 2013 Tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional.

Adapun prosedur pengadaan obat yang tidak tersedia (CITO) sebagai berikut:

- 1) Informasikan kepada dokter tentang ketidaksediaan obat yang diminta
- 2) Berikan usulan alternative penggantian obat
- 3) Siapkan obat yang disetujui oleh dokter sesuai prosedur penyiapan obat, jika tidak setuju lakukan langkah nomor 4
- 4) Dilaporkan ke pengadaan untuk melakukan peminjaman obat ke sarana pelayanan farmasi di luar rumah sakit yang bermitra dengan rumah sakit
- 5) Adakan obat menurut prosedur pengadaan (dalam jam kerja)
- 6) Lakukan pembelian ke rumah sakit atau apotek yang bekerjasama atau diluar kerja sama
- 7) Dokumentasikan semua kegiatan pengadaan obat dan bukti pembelian sebagai pertanggung jawaban keuangan.

Adapun Unit Terkait diantaranya yaitu :

- 1) Dokter penulis Resep
- 2) Komite Farmasi Terapi
- 3) Kepala Instalasi Farmasi
- 4) Kasir

Berdasarkan salinan keputusan menteri kesehatan tentang formularium nasional, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen lampiran yang terkait dengan keputusan menteri kesehatan tentang daftar obat pilihan yang harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai dasar dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Obat yang dibutuhkan dalam lokasi penelitian tidak terdapat di dalam formularium nasional serta dapat menggunakan obat lain yang sejenis mengacu pada persetujuan komite medik dan Kepala/Direktur Rumah Sakit setempat.

Pembahasan

Penerapan Akuntansi Persediaan Obat-obatan Pada Rumah Sakit Umum Majene

Melihat dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) RSUD Majene (halaman 17) pada lampiran 4, Dijelaskan bahwa persediaan adalah alat likuid berupa barang atau peralatan yang dirancang untuk mendukung kegiatan operasional BLUD RSUD Majene, serta barang yang dijual dan / atau diserahkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan barang yang ada di BLUD RSUD Majene dalam catatan atas laporan keuangan pada (lampiran 4) berupa:

1. Persediaan barang farmasi
2. Persediaan barang gizi
3. Persediaan barang alat tulis kantor dan cetakan
4. Persediaan perlengkapan rumah tangga, dan bahan pembersih
5. Persediaan alat-alat listrik habis pakai.

Pengakuan Persediaan Obat-obatan RSUD Majene

Dalam hal pengakuan persediaan obat-obatan, RSUD Majene mengalami perubahan jumlah persediaan obat-obatan tiap tahunnya seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Persediaan Obat-Obatan RSUD Majene

No	Tahun	Jenis Persediaan	Jumlah
1	2017	Persediaan obat-obatan	Rp 1.379.733.561
2	2018	Persediaan obat-obatan	Rp 990.130.510

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat perubahan persediaan obat dari tahun 2017 ke tahun 2018 senilai Rp 389,603.051. Artinya persediaan obat-obatan di RSUD Majene mengalami perubahan persediaan tiap tahun.

Pengukuran Persediaan obat-obatan RSUD Majene

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa persediaan dicatat pada harga beli, dan harga beli merupakan bagian dari harga pokok. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa RSUD Majene telah menerapkan PSAP No. 05. Menurut penjelasannya, terdapat tiga metode untuk mengukur nilai persediaan, salah satunya adalah biaya yang diperoleh melalui pembelian. Sedangkan dalam evaluasi inventarisasi digunakan hasil wawancara yang dilakukan oleh RSUD Majene dengan metode FIFO (*Firs In, First Out*) untuk mengevaluasi sistem. Hal ini sejalan dengan PSAP No. 05 yang menunjukkan bahwa metode sistematis seperti FIFO dapat digunakan untuk menilai persediaan (*Firs In, First Out*).

Beban Persediaan obat-obatan RSUD Majene

Berdasarkan penjelasan PSAP No. 5 paragraf 22, biaya persediaan dicatat dalam hal penggunaan persediaan. Lakukan penghitungan beban inventaris untuk menampilkan laporan operasi. Dalam hal daftar catatan, pemerintah diperbolehkan menggunakan cara permanen dan cara fisik (berkala).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan beberapa dokumen seperti, catatan atas laporan keuangan RSUD Majene di jelaskan bahwa dalam pencatatan persediaan obat-obatan pihak rumah sakit menggunakan pencatatan secara perpetual dalam mencatat persediaan obat-obatannya.

Pengungkapan Persediaan RSUD Majene

Rumah Sakit Majene telah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengukur persediaan pada akhir periode. Hal ini sejalan dengan PSAP No. 5, No. 26 PP No. 71 Tahun 2010, bahwa laporan keuangan mengungkapkan poin pertama dari kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengukur persediaan. Jika poin kedua dan ketiga dari PSAP Nomor 5 Nomor 26 PP Nomor 71 Tahun 2010 tidak ada masalah dalam hal pengungkapan persediaan. Karena pengungkapan persediaan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada entitas yang bersangkutan. Dengan cara ini RS Majene tidak akan melanggar PSAP No. 5 paragraf 26. Dari pembahasan di atas, maka dapat dibuat daftar *Check list* atas penerapan akuntansi persediaan pada RSUD Majene berdasarkan standar yang berlaku, sebagai berikut:

Tabel 2
Penerapan Akuntansi Persediaan Obat-Obatan Rumah Sakit Umum
Daerah Majene berdasarkan PSAP No.05

Keterangan	indikator	Penerapan	
		Ya	Tidak
Pengakuan	Konfirmasi persediaan menggunakan metode aset		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketika pemerintah memperoleh potensi manfaat ekonomi masa depan dan nilai atau biayanya dapat diukur dengan andal. b. Saat menerima atau memiliki hak kepemilikan dan / atau kontrol 	√	
Pengukuran	Pengukuran persediaan adalah sebagai berikut:	√	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Biaya (jika diperoleh melalui pembelian) 		√

	<p>b. Biaya produksi (jika diperoleh melalui produksi sendiri).</p> <p>c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.</p>		√
Beban Persediaan	<p>Beban Persediaan</p> <p>a. Biaya persediaan dicatat sesuai dengan jumlah persediaan yang digunakan. .</p> <p>b. Apabila persediaan dicatat secara permanen maka pemakaian persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang digunakan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.</p> <p>c. Jika persediaan dicatat secara teratur, pengukuran penggunaan persediaan dihitung berdasarkan persediaan sebenarnya, yaitu biaya per unit ditentukan oleh saldo awal ditambah persediaan yang dibeli atau diperoleh dikurangi saldo akhir persediaan dikalikan dengan nilai menurut evaluasi. metode yang digunakan.</p>	<p>√</p> <p>√</p>	√
Pengungkapan	<p>Pengungkapan</p> <p>a. Kebijakan akuntansi untuk mengukur persediaan;</p> <p>b. Petunjuk lebih lanjut mengenai pemindahan perbekalan seperti komoditi atau peralatan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, komoditi atau alat yang digunakan dalam proses produksi, komoditi yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan komoditi yang masih dalam proses produksi untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat ; dan</p>	√	<p>√</p> <p>√</p>

	c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang		
--	---	--	--

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan akuntansi persediaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah Mazhen, dapat disimpulkan bahwa akuntansi persediaan obat Rumah Sakit Umum Daerah Mazhen memenuhi standar yang berlaku. Penegasan suplai obat oleh RSUD Mazhen ini sejalan dengan PSAP 05 2010 yang ditandai dengan konfirmasi inventori pada saat penerimaan barang, atau perubahan kepemilikan barang. Demikian pula pengukuran persediaan, beban persediaan, dan persediaan obat Rumah Sakit Umum Majene juga harus dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh standar akuntansi pemerintah.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Majene antara lain sebagai berikut:

1. Rumah sakit diharapkan memperkuat pelatihan terkait akuntansi persediaan untuk mengetahui perubahan yang sesuai dengan ketentuan PSAP yang berlaku.
2. Rumah sakit juga harus memperhatikan data ketersediaan obat agar dapat memberikan manajemen dan pelayanan obat yang baik kepada pasien
3. Diharapkan kedepannya rumah sakit dapat menggunakan teknologi / teknologi komputerisasi untuk mengimpor dan mendata obat.
4. Bagi peneliti lebih lanjut, dalam rangka menambah variabel penelitian atau memperluas ruang lingkup penelitian selanjutnya dan kelemahan penelitian ini maka hasil penelitian lebih akurat dan dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda, Irma, dkk. 2010. *“Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Persediaan Obat-Obatan”* (Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik). Skripsi. (<http://eprints.upnjatim.ac.id>, diakses 26 Februari 2019).

- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Siyoto, Sandu, dkk. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing,